

## KATA PENGANTAR

*Round table discussion* bertajuk "Perspektif Pengusaha Hutan dalam Menyikapi Kasus-kasus Tenurial di Unit Pengusahaan Hutan Produksi" telah sukses dilaksanakan oleh Working Group Tenure dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) pada 22 Februari 2005 di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda diskusi serial WGT yang dilaksanakan bersama-sama dengan masing-masing kelompok dari berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) merupakan salah satu *stakeholder* representasi dari kelompok dunia usaha pengelolaan hutan produksi di Indonesia. APHI memiliki peran sangat penting dalam membina dan menyalurkan aspirasi anggotanya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang bertumpu pada kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.

Proseding ini merupakan dokumentasi dari *round table discussion* tersebut. Beberapa hal penting yang mengemuka dalam diskusi ini adalah identifikasi permasalahan tenurial di kawasan hutan produksi, sumber-sumber masalah dan upaya-upaya di tingkat lokal/lapangan yang telah dan diusulkan untuk dilakukan. Ada pengalaman dan perspektif dari PT Intracawood Manufacturing - Kalimantan Timur, PT Finantara Intiga - Kalimantan Barat, PT Alas Kusuma Group Kalimantan dan PT Korindo - Papua. Juga beberapa perspektif pemerintah, dalam hal ini Direktorat Bina Hutan Tanaman dan Bina Hutan Tanaman, Ditjen Bina Produksi Kehutanan (BPK) dan Badan Planologi, Departemen Kehutanan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Ir. Hendro Prastowo yang telah bersedia terlibat langsung dalam diskusi, juga kepada Pengurus dan Direksi APHI yang telah mendukung suksesnya kerjasama dalam penyelenggaraan diskusi. Terlebih juga kepada panitia penyelenggara, pencatat (dokumentator), dan fasilitator yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya.

Mudah-mudahan proseding ini dapat bermanfaat sebagai acuan tindak lanjut dalam upaya mencari solusi bersama yang memuaskan berbagai pihak.

Bogor, Maret 2005  
Working Group Tenure

ttd.

Iman Santoso  
*Koordinator*

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan/Summary

I. Sambutan Pembukaan

KEPASTIAN HUKUM LAHAN HUTAN BELUM BISA DITEGAKKAN

II. Catatan Proses dan Hasil Diskusi

Sesi I: Konsep-konsep Tenurial, masalah tenurial di kawasan hutan

Sesi II: Pengalaman dan Kasus-kasus Tenurial di Wiyayah Unit Pengelolaan Hutan Produksi

Sesi III: Rumusan Hasil Identifikasi Masalah & Usulan Tindak Lanjut

III. Materi Pendukung Diskusi (Makalah dan Presentasi)

*Sesi I*

1. Masalah Tenurial pada Kawasan Hutan *(oleh Pak Iman Santoso)*
2. PerspektifPengeioloaan Sumber Daya Hutan Berkaitan dengan Aspek Tenurial  
*(oleh Pak Boen Purnama)*
3. Persepektif Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkaitan dengan Aspek Tenurial  
*(Oleh Pak Abi Kusno)*

*Sesi II*

4. Kasus dan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan  
*(Oleh Heru Basuki, PT. Intracawood -Kalimantan Timur)*
5. Resolusi Konflik Sosial dan Lahan di PT. Finantara Intiga - Kalbar  
*(Oleh Heri Rosykin, PT. Finantara Intiga - Kalimantan Barat)*
6. Pengalaman dan Pemikiran dalam Pengembangan Resolusi Konflik Menyangkut Kasus-kasus Tenurial  
*(Oleh IBW Putra)*
7. Beberapa Permasalahan Hak Ulayat Sebagai Sumber Konflik dengan Masyarakat Sekitar Hutan di HPH PT. Konndo Group  
*(oleh Murtini)*

LAMPIRAN

1. Kerangka Acuan *Round table discussion* & Daftar Undangan
2. Daftar Undangan Peserta
3. Dokumentasi Foto-foto

## RINGKASAN

### "Perspektif Pengusaha Hutan Oalam Menyikapi Kasus-Kasus Tenurial Oi Unit Pengusahaan Hutan Produksi"

#### A. Latar belakang dan Tujuan

*Working Group Tenure* telah menginisiasi agenda serial diskusi dalam bentuk *Roundtable discussion* sebagai salah satu proses pembelajaran para pihak untuk mengkaji secara mendalam mengenai masalah dan aspek-aspek yang terkait dengan tenurial (penguasaan tanah) di kawasan hutan *Roundtable discussion* yang melibatkan para pihak, dari kelompok pengusaha hutan ini terselenggara atas kerja sama WG Tenure dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) pada tanggal 22 Februari 2005 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Tujuan *Roundtable discussion* kedua ini adalah untuk; (1) mengidentifikasi masalah, pandangan dan pengalaman pihak pengusaha hutan dalam menghadapi dan mengelola kasus-kasus tenurial di wilayah unit kerjanya; (2) merumuskan agenda tindak lanjut yang diharapkan berupa peran atau mandat kepada WG Tenure untuk opsi-opsi resolusi konflik kasus-kasus tenurial.

Hadir berpartisipasi dalam diskusi ini sebanyak 43 orang peserta perwakilan dari pengusaha hutan anggota APHI, perwakilan Pemerintah (Badan Planologi Kehutanan dan Ditjen Bina Produksi Kehutanan), anggota pengurus WG Tenure dan lembaga donor (DFID).

#### B. Proses Diskusi

Pembukaan *Roundtable discussion* dilakukan oleh masing-masing perwakilan penyelenggara, yaitu Direktur Eksekutif APHI (Bapak Hendro prastowo) dan Koordinator WG Tenure (Bapak Iman Santoso).

Proses presentasi dan diskusi dalam *Roundtable Discussion* dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama merupakan presentasi dari Working Group-Tenure, APHI dan Pemerintah yang diwakili oleh Badan Planologi Kehutanan dan Ditjen Bina Produksi Kehutanan (BPK). Sesi kedua merupakan presentasi dari Unit Pengelolaan Hutan Produksi baik Hutan Tanaman (HTI) maupun Hutan Alam (HPH). Sesi ketiga merupakan pembahasan hasil perumusan identifikasi masalah-masalah yang ditemukan pada sesi pertama dan kedua, serta usulan atau rekomendasi pendekatan tindak lanjutnya.

Diskusi pada sesi pertama difasilitasi oleh Martua Sirait (ICRAF/Sekretaris WGT) membahas materi temuan masalah-masalah tenurial di kawasan hutan oleh Koordinator WGT (Bapak Iman Santoso), konsep-konsep tenurial yang terkait dengan pengelolaan hutan oleh Direktur Bina Hutan Alam Ditjen BPK (Bapak Sutrisno) dan Direktur Bina Hutan Tanaman Ditjen BPK (Bapak Deny Kustiawan), pengelolaan sumber daya hutan yang terkait dengan masalah tenurial oleh Listyani yang mewakili Kepala Baplan Kehutanan dan oleh Bidang Sosial APHI (Bapak Abi Kusno).

Diskusi pada sesi kedua difasilitasi oleh Bapak Achmad Fachrozi (Inhutani I) mengupas kasus-kasus dan pengalaman menghadapinya di wilayah unit kerja pengelolaan hutan produksi. Presentasi kasus dan pengalaman itu berasal dari empat lokasi unit pengelolaan, yaitu PT Intraca Wood Manufacturing - Kalimantan Timur oleh Bapak Heru Basuki; PT Finantara Intiga - Kalimantan Barat oleh Bapak Hery Rosyikin; PT Alas Kusuma Group Kalimantan Timur oleh Bapak IBW Putra dan PT Korindo - Papua oleh Ibu Murtini.

Diskusi pada sesi ketiga difasilitasi oleh Suwito (WGT) membahas hasil temuan masalah dan usulan rekomendasi pendekatan yang didokumentasikan oleh Bapak Rukmantara (Konsultan WGT). Peserta diberikan kesempatan untuk mencermati dan mengoreksi hasil catatan tersebut,

bahkan juga diberikan kesempatan untuk menambahkan temuan dan usulan baru yang belum tercatat.

### **C. Identifikasi masalah dan usulan rekomendasi tindak lanjut.**

*Roundtable discussion* telah menghasilkan rumusan identifikasi masalah tenurial dan usutan/rekomendasi untuk pendekatan tindak lanjut di wilayah unit pengelolaan hutan produksi. Hasil rumusan identifikasi masalah dan usulan tersebut telah dibahas bersama-sama dengan peserta pada sesi ketiga.

Beberapa temuan masalah penting dari hasil *roundtable* ini diantaranya adalah;

- (a) Adanya kelemahan dan tumpang tindih dalam distribusi kewenangan, terjadi tarik menarik antara pemerintah pusat dan daerah;
- (b) Konsep kawasan "*clear and clean*" sulit diterapkan dan masyarakat terancam kehilangan akses terhadap lahan hutan sebagai sumber kehidupannya sejak sebelum ditunjuk menjadi kawasan hutan, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pola pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan prosedur pengambilan keputusan persetujuan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing pihak secara jelas (*clear*);
- (c) Tumpang tindih penguasaan lahan oleh pemerintah dan masyarakat ad at telah menimbulkan ketidakpastian kawasan dan ketidakpastian usaha, sehingga harus dicari solusi untuk kepastian kawasan dan kepastian usaha;
- (d) Delineasi ulang kawasan diperlukan dengan memperhatikan pengakuan (*legitimate*) multipihak
- (e) Komunikasi antar institusi masih lemah, sehingga perlu dibangun dialog atau forum komunikasi antar para pihak.

### **Rekomendasi Tindak Lanjut**

Atas temuan-temuan masalah tersebut peserta diskusi mengusulkan atau merekomendasikan secara umum kepada *Working Group Tenure* bersama-sama dengan Tim Kecil yang sudah dibentuk di APHI agar melakukan pertemuan/pertemuan lanjutan untuk menentukan kegiatan pembelajaran bersama para pihak terkait secara konkrit di lapangan. Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan penentuan lokasi uji coba kegiatan pembelajaran yang disepakati bersama.

## SUMMARY

### "Forest Companies' Perspective in Addressing Tenurial-Related Conflicts Within Concession of Production Forest Management Units"

#### A. Background and Objectives

Working Group Tenure has initiated a series of discussions in the form of Roundtable Discussion to serve as a multi stakeholder learning media to make in-depth analyses of tenurial-related conflicts. After the first roundtable discussion on 7 October 2003, the second multi stakeholder roundtable discussion was held on 22 February 2005 at Manggala Wanabakti building, Jakarta, in collaboration of WG Tenure and Association of Indonesia's Forest Companies (*Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI*).

The second roundtable discussion aimed to (1) identify the problems, the insights and the experience of forest enterprises in dealing with and addressing tenurial-related conflicts within their forest management units; and (2) formulate roles of or mandate to WGT as the follow-up agenda so that the group could develop conflict resolution options.

The discussion was attended by 43 representatives from APHI, the government (the Forest Planning Institute and the Directorate General of Forest Production/BPK), board member of WGT and DFID (the donor).

#### B. The Discussion

The discussion was officially opened by the organizer's representatives Mr. Hendro Prastowo (Executive Director of APHI) and Mr. Iman Santoso (NGT Coordinator).

The discussion was organized into three sessions: two presentation sessions and one conclusion session. The first session, facilitated by Mr. Martua Sirait (ICRAFIWGT Secretary), Mr. Iman Santoso (WGT Coordinator) presenting the findings of tenurial-related conflicts within forestland. Followed by Me Sutrisno (Director of BPK's *Bina Hutan Alam*) and Mr Deny Kustiawan (Director of BPK's *Bina Hutan Tanaman*) presenting tenurial concepts of forest management. Ms. Listyani (representing the Head of Baplan Kehutanan) and Me Abi Kusno (APHI's Social Issues) presenting tenurial-related forest management.

The second session was facilitated by Mr. Achmad Fachrozi (Inhutani I), who also shared his experiences in dealing with the cases in four forest management units. The said cases were of PT Intraca Wood Manufacturing - East Kalimantan, presented by Me Heru Basuki; PT Finantara Intiga - West Kalimantan by Mr. Hery Rosyikin; PT Alas Kusuma Group - East Kalimantan by Mr. IBW Putra; and PT Korindo - Papua by Mrs. Murtini.

The third session was facilitated by Mr. Suwito (WG1) discussing the findings and the approaching recommendations documented by Mr. Rukmantara (WGT Consultant). The participants were invited to be critical and responsive to the documentation, and at the same time they were also allowed to forward some additions and new suggestions.

#### C. Problem Identification and Recommendations

The third session produced the identification of tenurial-related conflicts and the recommendations for follow-up actions to be implemented in the forest management units.

The discussion unveiled several important findings, as follows:

- (a) The weak and overlapping authority distribution led to a tug-of-war between the central and the regional governments;
- (b) The "clear and clean area" concept was hard to apply. Local communities might lose access to their source of livelihood (i.e. forests) even before the designation of the forests. Addressing

the problems would require policies fostering agreed participatory forest management with clear decision-making processes undertaken in accordance with the authority of each party involved.

- (c) The overlapping forest management of the State and the indigenous people created uncertainty in territories and business. This had to be addressed property;
- (d) Re-delineation was needed with respect to multi stakeholder's consent (*legitimate*)
- (e) Inter-governmental institution communication was lacking. A dialog/ communication forum needed to be established.

### **Recommendations**

Based on the above findings, the participants agreed to a general recommendation that Working Group Tenure in collaboration with the Small Team already formed within APHI should hold further meetings to establish concrete multi stakeholder learning processes in the field. The meetings were expected to produce an agreed pilot site for the learning processes.

**I Sambutan Pembukaan:  
“KEPASTIAN HUKUM LAHAN HUTAN BELUM BISA DITEGAKKAN”**

*Round table discussion* dibuka oleh APHI dan WG-Tenure sebagai pihak penyelenggara yang masing-masing diwakili oleh Bapak Ir. Hendro Prastowo (Direktur Eksekutif APHI) dan Bapak Ir. Iman Santosa, M.Sc. (Koordinator WGTenure). Poin-poin penting sambutan disajikan dalam Box Pointer berikut;

Pointers Pembukaan Round Table Discussion  
“PERSPEKTIF PENGUSAHA HUTAN DALAM MENYIKAPI KASUS-KASUS  
TENURIAL DI UNIT PENGUSAHAAN HUTAN PRODUKSI”  
oleh Direktur Eksekutif APHI: Ir. Hendro Prastowo  
Diselenggarakan atas kerjasama antara APHI dan WG-Tenure  
Selasa, 22 Februari 2005

- Masalah lahan sangat crucial dimana sampai saat ini masih terdapat konflik antara masyarakat dan pemerintah, padahal keadaan pertanahan yang belum menentu akan mengakibatkan tersendatnya pembangunan.
- Kepastian hukum mengenai lahan hutan belum bisa ditegakkan, dan beberapa kali sering terjadi konflik antara masyarakat dan pengusaha HPH/HPHTI
- Berdasarkan kesepakatan anggota APHI tahun 1988, para anggota melalui APHI sepakat untuk melakukan foto uara secara cermat, sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat mengenai bentuk konfigurasi lahan hutan termasuk hutan lindung dimana hasil potret ini bisa dibicarakan dengan pihak pertanahan sehingga tumpang tindih lahan dapat dihindari seminimal mungkin.
- Penyelesaian masalah-masalah pertanahan tersebut disamping merupakan komitmen pemerintah kepada *Consultative Group on Indonesia (CGI)* yang tertuang dalam komitmen 11 (1 Februari 2000) juga merupakan TAP MPR no IX tahun 2001 yang memandatkan kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan pengkajian berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian konflik dan menata kembali sistem tenurial sumberdaya hutan guna tercapainya **kepastian dan perlindungan hukum**, serta keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
- Keberadaan *Working Group Tenure (WGT)* yang merupakan sebuah kelompok kerja multipihak yang terdiri dari wakil swasta, pemerintah, masyarakat dan lembaga non-pemerintah yang bersifat independen, yang dibentuk oleh pemerintah beserta mitra-mitranya untuk melakukan inisiasi penyelesaian masalah-masalah penguasaan pertanahan dikawasan hutan, diharapkan dapat mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi konflik mengenai pertanahan di kawasan areal hutan produksi.
- Dengan diadakannya diskusi hari ini diharapkan masukan-masukan yang konstruktif dari para pemegang HPH/HPHTI untuk menjangkir bagaimana perspektif swasta tentang persoalan tenurial serta usulan-usulannya secara kongkrit untuk menjadi bahan diskusi dalam proses diskusi panel multipihak.